

# **Demo di Pemkot Batam, Buruh Soroti Pengawasan K3 dan Omnibus Law**

Para buruh menyoroti pengawasan pemerintah terkait K3 ini menyusul insiden kecelakaan kerja yang kerap terjadi di Batam. #publisherstory #kepribadian Para buruh di Kota Batam yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Batam melakukan aksi demo di depan kantor Wali Kota Batam, Selasa (14/3). Mereka menyoroti terkait pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan pengesahan Omnibus Law. Ketua KC FSPMI Kota Batam, Yapet Ramon, menyebut, pihaknya menyoroti pengawasan pemerintah terkait K3 ini menyusul insiden nahas kecelakaan kerja yang kerap terjadi di industri Batam. "Kemana pengawasan K3, pekerja kami tewas, kasihan keluarga dan tiba-tiba lenyap tanpa ada kejelasan," ujar Yapet Ramon kepada awak media. Selain terkait pengawasan K3, para buruh turut mempertanyakan alasan pihak terkait tidak terbuka dalam penyelidikan, seperti yang dijelaskan dalam Permenaker No 33/2016. Karena itu, mereka meminta agar pemerintah membentuk tim pencari fakta untuk mengusut setiap kecelakaan kerja yang terjadi. "Kasus ini akan dikawal sampai tuntas dan meminta pemerintah untuk membuat tim pencari fakta. Ini agar tidak terulang kejadian serupa," sambungnya. Ia menekankan, pengusutan insiden laka kerja tidak sangkut-paut dengan kompensasi. Meski santunan telah diberikan, proses hukum harus tetap berjalan. "Meski kompensasi diberikan oleh perusahaan ke pihak keluarga. Tapi proses pidana jangan berhenti. Harus berjalan dan tindak tegas dapat memberikan efek jera," lanjut Yapet. Selain menyoroti pengawasan K3, aksi buruh ini juga untuk mengkritisi rencana DPR RI untuk melakukan rapat terkait pengesahan Omnibus Law. Selain itu, massa juga menyoroti perihal audit pejabat Dirjen Pajak yang viral, serta pengesahan UU kesehatan dan lain-lain. "Ada tiga titik kita sampaikan aspirasi kita hari ini di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPT Pengawasan Kerja dan Transmigrasi Kepri, Kantor Wali Kota Batam, dan Kantor DPRD Batam," pungkasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam Rudi Sakyakirti saat diminta tanggapannya menyebutkan bahwa pengawasan keselamatan kerja merupakan wewenang Disnaker Provinsi Kepri. Sementara terkait permintaan pembentukan tim pencari fakta yang disampaikan para buruh,

ia mengaku akan membahas lebih lanjut bersama Wali Kota Batam. "Ini tentunya akan dikoordinasikan dengan Disnaker Provinsi. Nanti, kita lihat dulu regulasi, kalau bisa kita akan bentuk," ucapnya saat dihubungi terpisah. Rudi mengakui bahwa peristiwa laka kerja memang kerap dilaporkan dan diterima pihaknya. Namun, pihaknya tidak dapat berbuat banyak, pasalnya bidang pengawasan bukan wewenang Disnaker Kota Batam. "Kita sifatnya hanya koordinasi. Semua itu berada di pengawasan Disnaker Provinsi," jelasnya.